

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian mengenai pengukuran tiga variabel utama penelitian ini yakni kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum responden, deskripsi variabel penelitian, pengujian hipotesis serta pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah pegawai di bagian keuangan dan bagian perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu. Pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden. Kuesioner tersebut kembali setelah penulis menunggu paling cepat satu hari hingga paling lama satu minggu sejak kuesioner disebar pada OPD tersebut.

Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2017 hingga tanggal 16 Januari 2018. Total kuesioner yang berhasil disebar yaitu sebanyak 150 lembar dan total kuesioner yang kembali sebanyak 130 lembar atau 86,6% termasuk 18 kuesioner yang masih kosong belum diisi, sehingga data yang bisa diolah sebanyak 112 kuesioner atau 74,6% dari total jumlah

kuesioner yang berhasil disebar atau 86,15% dari jumlah kuesioner yang kembali.

Berikut ini merupakan rincian dan gambaran dari data jumlah kuesioner yang telah berhasil disebar :

Tabel 4.1
Data Kuesioner Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang dikembalikan	130	86,6%
Kuesioner yang dapat diolah	112	74,6%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	18	12%

Sumber : Data Primer yang di olah

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini akan menyajikan identitas responden secara rinci yang meliputi : jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, lama bekerja, bagian/departemen, dan usia. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2**Data Karakteristik Responden**

Profil	Kategori	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	57	51%
	Perempuan	55	49%
	Jumlah Responden	112	
Tingkat Pendidikan	SMA / Sederajat	2	2 %
	D3	17	15%
	S1	73	65%
	S2	20	18%
	S3	0	0%
	Jumlah Responden	112	
Latar belakang Pendidikan	Ekonomi/ Akuntansi	66	59%
	Hukum	1	1%
	Sosial	9	8%
	Teknik	4	3,5%
	Lainnya	32	28,5%
	Jumlah Responden	112	
Lama Bekerja	1 – 5 tahun	9	8%
	6 – 10 tahun	48	43%
	11 – 15 tahun	28	25%
	16 – 20 tahun	17	15%
	> 20 tahun	10	9%
	Jumlah Responden	112	
Departemen / Bagian	Keuangan	72	64%
	Perencanaan	40	36%
	Jumlah Responden	112	
Usia	20 – 30 tahun	21	19%
	31 – 40 tahun	57	51%
	41 – 50 tahun	28	25%
	> 50 tahun	6	5%
	Jumlah Responden	112	

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 57 orang atau sebesar 51% dari total jumlah responden sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 55 orang atau sebesar 49% dari jumlah total responden. Kemudian, responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat terdiri dari 2 orang atau 2%, tingkat

pendidikan D3 terdiri dari 17 orang atau 15%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 73 orang atau 65%, jenjang pendidikan S2 berjumlah 20 orang atau 18%, sedangkan jenjang pendidikan S3 tidak ada.

Responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi berjumlah 66 orang atau 59% dan hukum berjumlah 1 orang atau 1%. Kemudian responden dengan latar belakang pendidikan sosial berjumlah 9 orang atau 8%, teknik berjumlah 4 orang 3,5%, dan responden dengan latar belakang pendidikan lainnya atau selain latar belakang pendidikan yang ada di atas berjumlah 38 orang atau 28,5% dari total jumlah responden secara keseluruhan. Selanjutnya, dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun berjumlah 9 orang atau 8%, masa kerja 6 sampai 10 tahun berjumlah 48 orang atau 43% , masa kerja 11 sampai 15 tahun berjumlah 28 atau 25%. Kemudian responden dengan lama bekerja 16 sampai 20 tahun berjumlah 17 orang atau 15% dan responden dengan masa kerja lebih dari 20 tahun berjumlah 10 orang atau 9% dari total responden.

Responden yang berada pada bagian/departemen keuangan berjumlah 72 orang atau 64% dan yang berada pada bagian perencanaan atau penyusunan program berjumlah 40 orang atau 36%. Kemudian dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 20 – 30 tahun berjumlah 21 orang atau 19%, kemudian rentang usia 31 – 40 tahun berjumlah 57 orang atau 51%, rentang usia 41 – 50 tahun berjumlah 28 orang atau 25%, dan responden dengan rentang usia diatas 50 tahun berjumlah 6 orang atau 5% dari total responden.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai variabel – variabel penelitian seperti nilai *mean* (rata-rata), nilai *Minimum* dan *Maximum* serta nilai standar deviasi Ghozali (2013).

Tabel 4.3
Uji statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	
Kejelasan sasaran anggaran	112	6	30	18	7	24	21,48	2,206
Partisipasi anggaran	112	5	25	15	6	21	16,46	2,397
Sistem pelaporan	112	4	20	12	4	24	16,06	1,532
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	112	6	30	18	6	26	22,72	2,364

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Tabel 4.3 diatas merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan deskripsi variabel-variabel penelitian dan jumlah responden nya. Adapun hasil statistik deskriptif secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Variabel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai rata-rata pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada kisaran teoritis yakni dengan nilai $22,72 > 18$. Selain itu variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,364 dan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 6 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 26. Sementara itu nilai minimum pada kisaran teoritis yakni sebesar 6 dan nilai maksimumnya sebesar 30. Nilai rata-rata dari jawaban responden pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan kisaran teoritis mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi terhadap akuntabilitas kinerja yang tinggi dalam pelaporan penganggaran yang ada di pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kuesioner untuk variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan pada tabel dan penjelasan berikut ini :

Tabel 4.4**Rincian Jawaban Variabel Dependen**

No	Pernyataan	STS & TS		Netral		S & SS	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan pada OPD ini.	2	1,8%	11	9,8%	99	88,4%
2.	Menurut saya OPD ini telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan dan program yang telah selesai dilaksanakan.	1	0,9%	29	25,9%	82	73,2%
3.	Menurut saya OPD ini telah melakukan pengecekan terhadap jalannya program.	1	0,9%	17	15,2%	94	83,9%
4.	Kurangnya insentif atau pengakuan positif, tidak menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan di OPD ini.	2	1,8%	62	55,3%	48	42,9%
5.	Pimpinan dan pegawai pada OPD ini telah mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan.	1	0,9%	11	9,8%	100	89,3%
6.	Pimpinan dan pegawai dalam OPD ini selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan.	1	0,9%	24	21,5%	87	77,6%

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pada item pertanyaan pertama variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan pada OPD Kota Bengkulu menunjukkan hasil bahwa

dari 112 responden 2 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju atau sebesar 1,8% dari jumlah responden. Kemudian sebanyak 11 responden memilih jawaban netral atau sebesar 9,8% dan 99 responden memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 88,4%. Berdasarkan hasil untuk item pertama tersebut menunjukkan bahwasanya OPD di Kota Bengkulu telah menjalankan kinerja yang telah sesuai dengan arah kebijakan yang ingin dituju sehingga program tersebut akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila pencapaian kinerja yang dilakukan telah maksimal maka akan berdampak pula pada tingginya tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

Pada item pertanyaan kedua variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang kegiatan analisis keuangan terhadap program yang telah selesai dilaksanakan pada OPD Kota Bengkulu menunjukkan bahwa dari 112 responden 1 responden atau sebesar 0,9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Selanjutnya 29 orang responden atau sebesar 25,9% memilih jawaban netral dan 82 orang atau sebesar 73,2% memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah melakukan analisis keuangan terhadap program maupun kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Sehingga bisa dikatakan

bahwa dengan dilakukannya analisis keuangan terhadap program yang telah selesai dilaksanakan yang dilakukan oleh OPD Kota Bengkulu akan mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja yang tinggi.

Pada item pertanyaan ketiga variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang pengecekan terhadap jalannya atau pelaksanaan program atau kegiatan pada OPD Kota Bengkulu menunjukkan bahwa dari 112 responden 1 responden atau sebesar 0,9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kemudian 17 responden atau sebesar 15,2% memilih jawaban netral dan 94 responden atau sebesar 83,9% memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Berdasarkan penjabaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa OPD yang ada di Kota Bengkulu telah melaksanakan pengecekan pelaksanaan program sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah menjadi tugas mereka sebagai pelayan masyarakat sehingga berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang ada di Kota Bengkulu.

Pada item yang keempat variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang kurangnya pemberian insentif atau bonus terhadap pegawai tidak akan menghambat penggunaan

informasi kinerja dalam pengambilan keputusan OPD. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 112 responden 2 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju atau sebesar 1,8%. Kemudian 62 responden atau sebesar 55,3% memilih jawaban netral dan 48 responden atau sebesar 42,3% memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa setengah dari total responden memilih jawaban netral dan tidak memilih jawaban yang pasti antara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan item keempat ini. Hal tersebut menurut penulis menunjukkan kecenderungan bahwa kurangnya pemberian insentif atau bonus kepada pegawai sewaktu-waktu bisa menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan yang ada di OPD Kota Bengkulu, namun cukup banyak juga responden yang memilih jawaban setuju sehingga masih banyak OPD yang tidak terpengaruh pemberian bonus terhadap pegawai dalam menggunakan informasi kinerja. Berdasarkan penjelasan yang panjang diatas secara garis besar bisa dikatakan bahwa masih terdapat potensi terhadap terjadinya hambatan penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan yang bisa terjadi di OPD Kota Bengkulu karena kurangnya pemberian insentif atau bonus kepada pegawai, sehingga bisa mempengaruhi akuntabilitas atau pertanggungjawaban OPD terhadap publik.

Pada item kelima variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pimpinan dan pegawai terhadap suatu program yang telah dilakukan OPD di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa dari 112 responden 1 responden atau sebesar 0,9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kemudian 11 responden atau sebesar 9,8% memilih jawaban netral dan 100 responden atau sebesar 89,3% memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih jawaban setuju dan sangat setuju bahwa di OPD mereka pimpinan dan pegawainya telah mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa OPD di Kota Bengkulu telah mempertanggungjawabkan setiap program yang telah dilakukan untuk mencapai tingkat akuntabilitas publik yang maksimal.

Pada item keenam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni tentang keterlibatan pimpinan dan pegawai secara bersama-sama dalam mengevaluasi suatu program atau kegiatan dan berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 112 responden 1 responden atau sebesar 0,9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kemudian sebanyak 24 responden atau sebesar 21,5% memilih jawaban netral dan 94 responden atau sebesar 77,6% memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Berdasarkan penjelasan diatas dapat

dilihat bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa di OPD mereka pimpinan dan pegawai nya secara bersama-sama terlibat dalam mengevaluasi suatu program atau kegiatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa OPD di Kota Bengkulu telah melibatkan semua pihak dalam melakukan evaluasi terhadap program maupun kegiatan yang ada sehingga akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban terhadap publik menjadi meningkat.

b. Variabel Kejelasan sasaran anggaran

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai rata-rata pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada kisaran teoritis yakni dengan nilai $21,48 > 18$. Selain itu variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,206 dan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 7 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 24. Sementara itu nilai minimum pada kisaran teoritis yakni sebesar 6 dan nilai maksimumnya sebesar 30. Nilai rata-rata dari jawaban responden pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan kisaran teoritis mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi terhadap kejelasan sasaran anggaran yang tinggi dalam penganggaran yang ada di pemerintah Kota Bengkulu.

c. Variabel Partisipasi anggaran

Variabel partisipasi anggaran memiliki nilai rata-rata pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada kisaran

teoritis yakni dengan nilai $16,46 > 15$. Selain itu variabel partisipasi anggaran memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,397 dan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 6 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 21. Sementara itu nilai minimum pada kisaran teoritis yakni sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 25. Nilai rata-rata dari jawaban responden pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan kisaran teoritis mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi terhadap partisipasi yang tinggi dalam proses penganggaran yang ada di pemerintah Kota Bengkulu.

d. Variabel Sistem pelaporan

Variabel sistem pelaporan memiliki nilai rata-rata pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan nilai rata rata pada kisaran teoritis yakni dengan nilai $16,06 > 12$. Selain itu variabel sistem pelaporan memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,532 dan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 4 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 24. Sementara itu nilai minimum pada kisaran teoritis yakni sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Nilai rata-rata dari jawaban responden pada kisaran aktual lebih tinggi dibandingkan kisaran teoritis mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap penggunaan sistem pelaporan dalam pelaporan anggaran yang ada di pemerintah Kota Bengkulu.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis faktor untuk melakukan uji validitas data. Analisis faktor berfungsi untuk mengidentifikasi struktur hubungan yang ada antar responden atau variabel dengan melihat korelasi antar responden atau antar variabel (Ghozali, 2013). Untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan apakah bisa dilakukan analisis faktor maka dapat dilakukan dengan alat uji yang bernama *Kaiser-Meiyer-Olkin* (KMO) dan *Barlette's Test*. Menurut Ghozali (2013) untuk dapat dilakukan analisis faktor maka diperlukan nilai KMO dan *Barlette's Test* $> 0,50$ maka data tersebut bisa dianggap memiliki validitas yang kuat.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,750	KSA1	0,953	Valid
		KSA2	0,950	Valid
		KSA3	0,679	Valid
		KSA4	0,565	Valid
		KSA5	0,904	Valid
		KSA6	0,892	Valid
Partisipasi Anggaran	0,840	PA1	0,890	Valid
		PA2	0,912	Valid
		PA3	0,834	Valid
		PA4	0,803	Valid
		PA5	0,801	Valid
Sistem Pelaporan	0,724	SP1	0,892	Valid
		SP2	0,922	Valid
		SP3	0,822	Valid
		SP4	0,727	Valid
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	0,790	AKIP1	0,636	Valid
		AKIP2	0,626	Valid
		AKIP3	0,828	Valid
		AKIP4	0,765	Valid
		AKIP5	0,841	Valid
		AKIP6	0,839	Valid

Sumber : Output SPSS, 2017.

Tabel 4.5 diatas menyajikan tentang ringkasan dari hasil uji validitas dari semua variabel penelitian yang ada. Berdasarkan hasil uji validitas yang tertera pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa total nilai dari variabel Kejelasan sasaran anggaran, Partisipasi anggaran, Sistem pelaporan dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan

nilai $> 0,5$ sehingga bisa disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada penelitian ini valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrumen untuk melakukan pengukuran terhadap kuesioner yang merupakan suatu indikator penilaian dari variabel. Menurut Wulandari (2011) suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan yang ada di kuesioner konsisten dan stabil setiap waktu. Dikatan reliabel suatu variabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,5$ (Ghozali, 2013).

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,910	6	Reliabel
Partisipasi Anggaran	0,900	5	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,861	4	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	0,854	6	Reliabel

Sumber : Output SPSS, 2017.

Tabel 4.6 diatas menunjukkan ringkasan dari hasil uji reliabilitas dari setiap variabel pada penelitian ini. Tabel 4.6 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel kejelasan sasaran anggaran adalah 0,910 artinya variabel kejelasan sasaran anggaran reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ dari 0,5.

Kemudian untuk variabel partisipasi anggaran menunjukkan hasil yang reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel partisipasi anggaran $0,900 > 0,5$. Selanjutnya variabel sistem pelaporan juga menunjukkan hasil yang reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* $0,861 > 0,5$ serta variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga menunjukkan hasil yang sama yakni reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* $0,854 > 0,5$.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada setiap variabel dalam penelitian ini reliabel. Sehingga item pertanyaan dalam penelitian ini bisa diajukan lebih dari satu kali dan telah menghasilkan hasil yang konsisten. Oleh sebab itu, data - data yang diperoleh bisa digunakan kembali pada penelitian berikutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan uji regresi. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah agar mendapatkan parameter yang handal dan valid N. Wulandari (2013). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang akan dilakukan yakni, uji Normalitas, uji Multikolinearitas, dan uji Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji sampel yang digunakan apakah telah memiliki distribusi normal yang artinya

memiliki makna dan karakteristik yang sama dengan populasinya. Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghozali (2013) apabila nilai signifikansi $>$ nilai 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One Kolmogorov-Smirnov	Nilai Sig.	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,582	Normal

Sumber : Output SPSS, 2017.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar $0,582 > 0,05$. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji korelasi antara setiap variabel independen. Apabila variabel independen yang akan diuji mempunyai korelasi maka ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Menurut Ghozali (2013) apabila nilai toleransi berada diantara 0 dan 1 $>$ 0,01 sama dengan nilai VIF (*Variance inflation factor*) $>$ 10 dikatakan terdapat multikoliearitas, namun apabila nilai VIF $<$ 10 maka dikatakan diantara variabel independen tidak terdapat korelasi atau multikolinearitas.

Tabel 4.8**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.768	1.790		.987	.326		
Kejelasan sasaran anggaran	.161	.074	.149	2.181	.031	.819	1.221
Partisipasi anggaran	.255	.068	.259	3.731	.000	.796	1.257
Sistem pelaporan	.829	.112	.537	7.386	.000	.722	1.384

a. *Dependent Variable* : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Output SPSS, 2017

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa data pada penelitian ini tidak terkena multikolinearitas. Hal tersebut dikarenakan pada seluruh variabel di atas memiliki nilai VIF < 10. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh data yang ada bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat kesamaan varian pada semua pengamatan yang ada di model regresi. Menurut Syafrial (2009) apabila ada kesamaan varians dari setiap residual pada suatu pengamatan maka disebut dengan homokedastisitas, namun apabila terdapat perbedaan maka dikatakan heterokedastisitas. Model

regresi dikatakan bebas dari heterokedastisitas apabila nilai signifikansi $> \alpha$ 0,05. (Sugiyono, 2010)

Tabel 4.9
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.081	.955		1.133	.260
Kejelasan sasaran anggaran	.035	.039	.094	.889	.376
Partisipasi anggaran	-.046	.036	-.134	-1.254	.212
Sistem pelaporan	.012	.060	.023	.207	.836

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output SPSS,2017

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua data yang ada tidak ada yang terkena heterokedastisitas. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi dari semua variabel $> 0,05$. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut bebas heterokedastisitas dan telah memenuhi kriteria.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012) uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. R^2 dapat diinterpretasikan bahwa

sebesar ($R^2 \times 100 \%$). Nilai dari koefisien determinasi yakni antara 0 dan 1.

Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati nilai nol atau kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil atau terbatas. Sedangkan apabila nilai *Adjusted R Square* mendekati nilai 1 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar. (N. Wulandari, 2013)

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.575	1.541

a. *Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran*

b. *Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,575. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas kinerja yang bisa dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan adalah sebesar 57,5 %. Sedangkan untuk sisanya sebesar 42,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan didalam penelitian ini telah signifikan atau tidak, sehingga apabila digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama model tersebut bisa digunakan. (N. Wulandari, 2013)

Menurut Ghozali (2013) apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima atau dengan kata lain H_0 ditolak. Namun sebaliknya apabila ternyata nilai signifikansi nya $> 0,05$ maka H_a ditolak atau dengan kata lain H_0 diterima.

Tabel 4.11
Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
<i>Regression</i>	364.115	3	121.372	51.143	.000 ^a
<i>Residual</i>	256.305	108	2.373		
<i>Total</i>	620.420	111			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Output SPSS, 2017.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai sigifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan bisa mempengaruhi variabel akuntabilitas kinerja secara simultan atau bersama-sama.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian parsial dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel bebas (independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara parsial atau individual terpisah dari variabel independen lainnya. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak atau dengan kata lain H_a diterima (Ghozali, 2013).

Tabel 4.12

Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.768	1.790		.987	.326
Kejelasan Sasaran Anggaran	.161	.074	.149	2.181	.031
Partisipasi Anggaran	.255	.068	.259	3.731	.000
Sistem Pelaporan	.829	.112	.537	7.386	.000

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber : Output SPSS, 2017.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan $< 0,05$. Dengan rincian nilai signifikansi untuk kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,031, variabel partisipasi anggaran sebesar 0,000, dan untuk variabel sistem pelaporan sebesar 0,000.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Berikut ini penjelasan tentang hasil uji hipotesis :

a. Uji Hipotesis 1 (H_1)

Hipotesis pertama penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sinifikansi dari variabel kejelasan sasaran anggaran adalah $0,031 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,161 dengan nilai positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H_1 penelitian ini diterima, dengan kata lain bahwasanya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Uji Hipotesis 2 (H_2)

Hipotesis kedua penelitian ini adalah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sinifikansi dari variabel partisipasi anggaran adalah $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,255 dengan nilai positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H_2 penelitian ini diterima, dengan kata lain bahwasanya partisipasi anggaran

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Uji Hipotesis 3 (H₃)

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sinifikansi dari variabel sistem pelaporan adalah $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,829 dengan nilai positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H₃ penelitian ini diterima, dengan kata lain bahwasanya sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran (X₁), partisipasi anggaran (X₂), dan sistem pelaporan (X₃) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Pada penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk melakukan uji regresi linier berganda. Hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,768 + 0,161 \text{ KSA} + 0,255 \text{ PA} + 0,829 \text{ SP} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstan sebesar 1,768. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan dianggap konstan dan diberi nilai nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat 1,768 satuan.

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,161. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila pengaruh kejelasan sasaran anggaran ditingkatkan 1 satuan, maka variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,161 satuan apabila variabel independen lain dianggap konstan. Sedangkan koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah dan pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu.

Selanjutnya nilai koefisien variabel partisipasi anggaran yakni sebesar 0,255. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila pengaruh partisipasi anggaran ditingkatkan 1 satuan, maka variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,255 satuan apabila variabel lainnya dianggap konstan. Sedangkan koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah dan pengaruh antara partisipasi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu.

Nilai koefisien variabel sistem pelaporan yakni sebesar 0,829. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila pengaruh sistem pelaporan ditingkatkan 1 satuan, maka variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,829 satuan apabila variabel lainnya dianggap konstan. Sedangkan koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah dan pengaruh antara sistem pelaporan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah kota Bengkulu. Berdasarkan hasil dan pengolahan data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa hipotesis kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan terdukung. Ada 3 faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD kota Bengkulu yakni kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pelaporan. Seluruh variabel dan hipotesis tersebut memiliki pengaruh positif dan Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya menghasilkan bahwa terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wahyuni (2014) yang menghasilkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian hasil penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian Anjarwati (2012) yang menghasilkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Zakiyudin (2015) juga sejalan yang mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran baik jangka pendek maupun panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu instrumen tolak ukur untuk menilai kinerja. Apabila anggaran itu disusun dengan jelas dan tepat sasaran maka seharusnya anggaran tersebut bisa menggambarkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dengan adanya penggambaran terhadap hasil kinerja tersebut maka pemerintah akan mudah melakukan penyampaian atau mempertanggungjawabkan terhadap setiap kinerja yang telah mereka lakukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan menghasilkan kinerja yang bagus dan

berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dihasilkan tersebut.

2. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Arifin (2012) yang mengatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut sejalan juga dengan penelitian Abdillah et al., (2013) yang menyimpulkan bahwa partisipasi pegawai dalam penganggaran akan mempengaruhi peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban kinerja pegawai secara signifikan. Kedua hasil penelitian tersebut juga didukung dan sejalan dengan hasil penelitian Kewo (2014) yang mengatakan bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kinerja.

Dengan adanya pelaksanaan partisipasi anggaran didalam proses penganggaran maka akan menimbulkan efek pada peneningkatan kinerja. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya partisipasi para pegawai akan saling bekerjasama dan bersinergi sehingga kinerja yang dihasilkan akan maksimal dan berimplikasi juga pada peningkatan akuntabilitas dan rasa tanggungjawab setiap individu yang terlibat didalam penyusunan anggaran

tersebut. Kemudian dengan adanya partisipasi para pegawai dalam penganggaran juga akan mengurangi kesalahan alur informasi yang akan mengganggu kinerja divisi dan juga instansi secara keseluruhan. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa partisipasi anggaran akan membuat semua pihak yang terlibat didalam partisipasi penganggaran tersebut menjadi mudah untuk bekerjasama karena adanya komunikasi dan interaksi antara staf biasa dan manager tingkat atas sehingga akan berimplikasi pada peningkatan kualitas kinerja, akuntabilitas dan rasa tanggungjawab dari masing-masing individu dan instansi pada umumnya.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pada pegujian hipotesis yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Khasanah (2016) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian didukung juga oleh penelitian Yuniarti (2016) yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut sejalan pula dengan penelitian Cahyani (2015) yang mengatakan bahwa penerapan sistem pelaporan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan adalah gambaran yang berisi pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dilakukan pemerintah. Sistem pelaporan yang bagus diperlukan sebagai alat untuk memantau kinerja seorang atasan dalam melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai organisasi yang mengelola dana publik maka instansi yang ada di pemerintah daerah harus bisa menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu melalui sebuah sistem pelaporan yang baik dan berkualitas. Oleh sebab itu dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan mempermudah instansi yang ada di pemerintah daerah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kinerja yang telah dilakukannya karena sistem pelaporan akan menciptakan suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga pengimplementasian anggaran akan berjalan maksimal.